

**Dinamika Ketimpangan Ekonomi di Era Digital: Studi Kualitatif terhadap
UMKM di Kota Lhokseumawe**

Sutan Febriansyah^{1,*}, Surya Darni¹, Nasruddin¹

¹Universitas Bumi Persada, Lhokseumawe, Indonesia

*Corresponding Author Email: sutanf@unbp.ac.id

Abstrak

Digitalisasi telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi modern, namun belum semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketimpangan ekonomi terjadi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Lhokseumawe dalam konteks transformasi digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen dari berbagai UMKM di wilayah kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital yang dialami UMKM mencakup tiga aspek utama: keterbatasan dalam mengakses infrastruktur teknologi, rendahnya tingkat literasi digital, serta minimnya dukungan kebijakan lokal yang inklusif. Di sisi lain, para pelaku UMKM di Lhokseumawe mengembangkan berbagai strategi adaptif, salah satunya dengan mengandalkan kekuatan jaringan sosial lokal untuk menopang bisnis mereka di tengah keterbatasan digital. Penelitian ini juga mengungkap bahwa ketimpangan digital turut memperlebar jurang ekonomi antarpelaku usaha dan menyebabkan eksklusi ekonomi bagi sebagian UMKM. Studi ini merekomendasikan perlunya pendekatan berbasis komunitas dan partisipatif dalam proses digitalisasi UMKM, serta menekankan pentingnya kebijakan daerah yang selaras dengan kondisi lokal. Secara akademik, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara digitalisasi, ketimpangan ekonomi, dan dinamika sosial di tingkat mikroekonomi lokal.

Kata kunci: Digital Literacy, Economic Inequality, MSMEs, Digital Transformation

Abstract

Digitalization has become an important factor in modern economic growth, yet not all business actors have equal opportunities to access and utilize it. This study aims to understand how economic inequality occurs among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lhokseumawe City within the context of digital transformation. Using a qualitative approach through case studies, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis from various MSMEs across the city. The research findings indicate that the digital divide experienced by MSMEs encompasses three main aspects: limited access to technological infrastructure, low levels of digital literacy, and a lack of inclusive local policy support. On the other hand, MSME actors in Lhokseumawe have developed various adaptive strategies, one of which relies on the strength of local social networks to sustain their businesses amidst digital limitations. This study also reveals that digital inequality widens the economic gap between business actors and causes economic exclusion for some MSMEs. The study recommends the need for a community-based and participatory approach in the MSME digitalization process, and emphasizes the importance of regional policies that align with local conditions. Academically, this research advances understanding of the relationship

among digitalization, economic inequality, and social dynamics at the local microeconomic level.

Keywords: Digital Literacy, Economic Inequality, MSMEs, Digital Transformation

PENDAHULUAN

Selama sepuluh tahun terakhir, dunia telah mengalami transformasi digital yang signifikan, memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Proses digitalisasi ini tidak hanya mempercepat pertukaran informasi dan transaksi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku bisnis, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM memiliki peran penting dengan kontribusi lebih dari enam puluh persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar sembilan puluh tujuh persen tenaga kerja, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya sektor UMKM dalam menopang perekonomian nasional, sekaligus menggambarkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan melalui digitalisasi.

Namun, di tengah kemajuan digital, muncul tantangan baru berupa ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh perbedaan akses terhadap teknologi, informasi, dan pasar. Pelaku usaha dengan sumber daya yang lebih memadai cenderung lebih diuntungkan, sehingga memperbesar jurang antara UMKM yang telah terdigitalisasi dan yang belum. Bank Dunia dalam laporannya tahun 2021 menggarisbawahi bahwa ketimpangan digital menjadi salah satu penghambat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di negara berkembang. Masalah ini semakin terasa di daerah yang belum memiliki infrastruktur digital yang merata, termasuk di Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, yang dulunya dikenal sebagai kota industri pada masa kejayaan LNG, kini menghadapi tantangan dalam membangun kembali ekonomi melalui sektor UMKM. Kota ini mengalami transformasi ekonomi yang cukup signifikan, dari basis industri ekstraktif menuju ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada usaha kecil dan menengah. Namun, banyak pelaku UMKM di kota ini belum siap dalam memanfaatkan teknologi digital, baik dari segi kemampuan sumber daya manusia, fasilitas, maupun tingkat literasi digital. Asnawi dan Syafruddin pada tahun 2021 mencatat bahwa UMKM di Lhokseumawe masih bergulat dengan persoalan mendasar seperti keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, dan minimnya pendampingan teknis, yang kemudian semakin kompleks ketika berhadapan dengan tuntutan digitalisasi.

Kesenjangan ini bukan hanya berdampak pada keterbatasan keuntungan bisnis, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Banyak UMKM masih menjalankan usahanya dengan cara tradisional, kesulitan menjangkau pasar digital, mengikuti pelatihan, atau mengoptimalkan penggunaan platform e-commerce. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana mereka yang tertinggal semakin sulit mengejar ketertinggalannya karena keterbatasan akses dan kapabilitas. Sementara itu, UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan pada akhirnya mengakumulasi keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan data lokal yang dirilis oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2023, hanya sekitar tiga puluh lima persen UMKM di kota ini yang aktif menggunakan media digital dalam kegiatan usahanya. Fakta ini menunjukkan adanya jurang digital yang nyata, terutama bagi pelaku usaha yang belum memiliki akses terhadap pelatihan atau infrastruktur digital yang memadai. Data

tersebut juga mengindikasikan bahwa mayoritas UMKM masih beroperasi secara konvensional, mengandalkan interaksi tatap muka dan pasar tradisional yang jangkauannya terbatas.

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji ketimpangan dalam hal adopsi teknologi digital di kalangan UMKM di Lhokseumawe, yang berisiko memperparah ketimpangan ekonomi lokal. Studi-studi sebelumnya sebagian besar masih bersifat kuantitatif dan belum secara khusus menyoroti konteks geografis kota ini. Pendekatan kuantitatif memang mampu memberikan gambaran umum tentang tingkat adopsi teknologi, namun kurang mampu menangkap kompleksitas pengalaman, strategi adaptasi, dan dinamika sosial-budaya yang melatarbelakangi ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif diperlukan untuk menggali lebih dalam pengalaman dan kondisi sosial para pelaku UMKM.

Keterbatasan dalam literatur ini menjadi dasar penting untuk melakukan penelitian kualitatif yang menelaah dinamika ketimpangan ekonomi di era digital, khususnya dalam konteks lokal seperti Lhokseumawe. Pendekatan ini dapat mengungkap faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi partisipasi UMKM dalam dunia digital. Dengan memahami konteks lokal secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tidak hanya akademis tetapi juga praktis bagi pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dinamika ketimpangan ekonomi dalam proses digitalisasi UMKM di Lhokseumawe, dengan menyoroti pengalaman langsung, hambatan, serta strategi adaptasi yang diterapkan oleh para pelaku usaha. Selain itu, penelitian juga akan membahas peran pemerintah, komunitas lokal, dan platform digital dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan efektif.

Secara teoritis, hasil studi ini diharapkan dapat memperluas wacana tentang ekonomi digital, ketimpangan struktural, serta perkembangan UMKM dalam konteks lokal Indonesia. Studi ini akan mengintegrasikan beberapa perspektif teoritis, yaitu teori ketimpangan ekonomi, teori transformasi digital, dan teori modal sosial, untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dari sisi praktis, temuan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM di era digital.

Dengan mendalami pengalaman langsung pelaku UMKM di lapangan, artikel ini memberikan kontribusi yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara kebijakan digitalisasi nasional dengan kondisi nyata ekonomi daerah, serta mendorong pemerataan manfaat transformasi digital secara lebih adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai pemerataan kesejahteraan yang harus dikelola dengan bijak sesuai dengan karakteristik lokal.

LANDASAN TEORI

Teori Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merujuk pada distribusi sumber daya ekonomi yang tidak seimbang antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian para ekonom dan sosiolog selama berabad-abad, namun bentuk dan manifestasinya terus berevolusi seiring dengan perubahan zaman. Teori ketimpangan

struktural menyatakan bahwa ketidaksetaraan ini bukan semata akibat faktor individu seperti kemampuan atau kerja keras, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Piketty dalam karyanya yang monumental pada tahun 2014 menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi cenderung meningkat secara alami dalam sistem kapitalisme jika tidak ada intervensi kebijakan yang kuat dari negara. Ia berargumen bahwa tingkat pengembalian modal (return on capital) yang secara historis lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok pemilik modal.

Dalam era digital, bentuk baru ketimpangan muncul melalui kesenjangan akses terhadap teknologi yang sering disebut sebagai digital divide. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berdimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Mereka yang memiliki akses dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital dapat mengakselerasi pertumbuhan usahanya, sementara yang tertinggal semakin terpinggirkan. Digital divide semakin memperlebar jurang ekonomi antarwilayah dan antar kelompok pelaku usaha, menciptakan apa yang disebut sebagai "lingkaran setan ketimpangan digital" di mana mereka yang sudah maju semakin diuntungkan oleh teknologi, sementara yang tertinggal semakin sulit mengejar.

Dalam konteks UMKM di Kota Lhokseumawe, ketimpangan ini tampak dari tidak meratanya akses ke infrastruktur digital, rendahnya tingkat literasi digital, dan perbedaan kemampuan dalam mengadopsi teknologi antar pelaku usaha. Kondisi ini semakin diperburuk dengan keterbatasan modal dan minimnya dukungan kelembagaan, yang menghambat transformasi digital di kalangan UMKM. Ketimpangan ini bersifat multidimensi dan saling terkait, di mana keterbatasan di satu aspek memperkuat keterbatasan di aspek lainnya.

Teori Transformasi Digital

Transformasi digital diartikan sebagai pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah cara kerja bisnis konvensional, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai baru bagi pelanggan. Bharadwaj dan rekannya pada tahun 2013 mendefinisikan transformasi digital sebagai strategi bisnis yang terintegrasi dengan teknologi informasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Bagi UMKM, digitalisasi membuka peluang besar dalam bentuk perluasan akses pasar, efisiensi operasional, dan peningkatan daya saing. Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan modal untuk mengadopsi teknologi.

Keberhasilan transformasi digital dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kesiapan teknologi (technology readiness) yang mencakup ketersediaan infrastruktur dan perangkat keras, kesiapan organisasi (organizational readiness) yang meliputi struktur manajemen dan budaya kerja yang mendukung digitalisasi, serta kemampuan individu dalam literasi digital (individual digital literacy) yang menentukan sejauh mana pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Ketiga faktor ini saling terkait dan harus dipenuhi secara simultan agar transformasi digital dapat berjalan dengan sukses.

Di Lhokseumawe, proses transformasi digital UMKM terkendala oleh rendahnya kesiapan di ketiga aspek tersebut. Infrastruktur digital belum merata, terutama di wilayah pinggiran kota. Kesiapan organisasi masih rendah karena banyak UMKM dikelola secara tradisional dengan struktur yang sederhana dan pembagian kerja yang tidak formal. Yang paling krusial, literasi digital pelaku UMKM masih terbatas, sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan potensi penuh dari teknologi yang tersedia. Kondisi ini berujung

pada makin lebarnya kesenjangan ekonomi berbasis digital antara UMKM yang telah dan belum terdigitalisasi.

Teori Modal Sosial

Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan, kepercayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Putnam dalam bukunya yang terbit tahun 2000 mendefinisikan modal sosial sebagai fitur dari organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Konsep ini menjadi semakin relevan dalam konteks digitalisasi karena menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan ekonomi.

Dalam masyarakat berbasis komunitas seperti Lhokseumawe, modal sosial memiliki peran penting, khususnya ketika keterbatasan akses teknologi menjadi hambatan utama. Masyarakat Aceh secara historis memiliki ikatan komunal yang kuat, yang tercermin dalam berbagai praktik gotong royong dan solidaritas sosial. Saat UMKM tidak mampu mengakses teknologi formal, mereka mengandalkan dukungan dari komunitas lokal, hubungan dengan pelanggan setia yang telah terbangun selama bertahun-tahun, serta bantuan informal dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Modal sosial ini menjadi alat bertahan bagi UMKM di tengah keterbatasan digital. Mereka dapat bertransaksi berdasarkan kepercayaan, mendapatkan informasi dari jaringan pertemanan, dan memasarkan produk melalui komunikasi dari mulut ke mulut yang masih efektif di komunitas lokal. Namun demikian, tanpa peningkatan kapasitas digital, ketergantungan pada relasi sosial semata berisiko memperkuat keterpinggiran dalam ekosistem digital yang semakin mendominasi perekonomian modern. Modal sosial harus dilihat sebagai fondasi yang dapat diperkuat dengan kapabilitas digital, bukan sebagai pengganti.

MODEL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menggali hubungan antara ketimpangan ekonomi, transformasi digital, dan modal sosial melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih agar mampu menggambarkan dinamika secara kontekstual dan mendalam, sesuai dengan kompleksitas fenomena yang diteliti. Model penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di antara UMKM di Lhokseumawe dalam era digital bukan hanya akibat akses fisik terhadap teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas literasi digital yang menentukan kemampuan memanfaatkan teknologi, kekuatan modal sosial lokal yang dapat menjadi penyangga sekaligus penghambat transformasi, peran pemerintah dalam merancang kebijakan intervensi yang efektif, dan kapasitas adaptasi masing-masing UMKM yang berbeda-beda. Keempat faktor ini berinteraksi secara kompleks membentuk pola ketimpangan yang khas di Lhokseumawe. Model ini mengakui bahwa tidak ada hubungan kausal yang linier dan sederhana, melainkan sebuah sistem yang saling mempengaruhi.

HASIL PENELITIAN

Ketimpangan Akses Digital

Hasil wawancara mendalam dengan pelaku UMKM di Lhokseumawe mengungkapkan bahwa hambatan terbesar terletak pada akses terhadap teknologi, termasuk koneksi internet yang stabil, perangkat digital yang memadai, serta keterampilan dalam

mengoperasikan teknologi secara praktis. Seorang pelaku usaha makanan ringan di Kecamatan Banda Sakti menceritakan bagaimana ia harus berulang kali menghentikan transaksi online karena sinyal internet yang putus-putus. Ia mengaku telah beberapa kali kehilangan pelanggan karena keterlambatan merespons pesanan atau ketidakmampuan mengunggah foto produk dengan kualitas baik. Pengalaman serupa juga disampaikan oleh pelaku usaha kerajinan tangan di Muara Dua yang mengeluhkan mahalnnya harga paket data dan ketidaktersediaan jaringan wifi di lingkungan tempat tinggalnya.

UMKM yang berlokasi di pusat kota umumnya lebih mudah mengakses fasilitas digital dibandingkan dengan yang berada di daerah pinggiran. Kawasan pusat kota seperti sekitar Simpang Empat dan kawasan perkantoran memiliki infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik karena menjadi prioritas pengembangan oleh penyedia layanan. Sementara itu, wilayah pinggiran seperti Blang Mangat dan Muara Satu masih mengalami keterbatasan akses, baik dari segi ketersediaan jaringan maupun kecepatan internet. Ketimpangan geografis ini menciptakan stratifikasi baru di kalangan UMKM, di mana lokasi usaha menentukan peluang untuk mengakses ekonomi digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan rekannya pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa ketimpangan digital umumnya dipicu oleh masalah infrastruktur dan lokasi geografis.

Selain masalah infrastruktur, keterbatasan perangkat digital juga menjadi kendala serius. Banyak pelaku UMKM yang masih menggunakan ponsel pintar dengan spesifikasi rendah, yang tidak mampu menjalankan aplikasi-aplikasi bisnis terkini atau menyimpan data dalam jumlah besar. Mereka juga tidak memiliki komputer atau laptop yang dapat digunakan untuk mengelola administrasi usaha secara lebih efisien. Keterbatasan ini bukan semata masalah ekonomi, tetapi juga menunjukkan rendahnya prioritas terhadap investasi teknologi di kalangan UMKM, yang sering kali lebih memilih mengalokasikan dana terbatasnya untuk kebutuhan operasional jangka pendek.

Perbedaan Tingkat Literasi Digital

Sebagian besar pelaku UMKM yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan media sosial untuk pemasaran, platform e-commerce untuk transaksi, maupun aplikasi keuangan digital untuk pembukuan dan manajemen keuangan. Banyak di antara mereka merasa tidak percaya diri atau takut melakukan kesalahan saat mencoba beralih ke dunia digital. Seorang pedagang pakaian di Pasar Inpres Lhokseumawe mengaku pernah mencoba berjualan di media sosial, namun berhenti karena bingung mengelola pesanan yang masuk dan khawatir salah mengirim barang. Ia merasa lebih nyaman berjualan secara langsung di mana ia dapat berinteraksi tatap muka dengan pembeli.

Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap pelatihan yang berkualitas. Pelatihan-pelatihan yang pernah diadakan oleh dinas terkait atau lembaga swasta sering kali terlalu teknis dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pelaku UMKM dengan latar belakang pendidikan terbatas. Selain itu, pelatihan umumnya bersifat satu kali dan tidak berkelanjutan, sehingga peserta cepat lupa dan kembali ke cara lama. Beberapa pelaku UMKM mengaku lebih percaya pada pengetahuan yang diperoleh dari tetangga atau keluarga dibandingkan instruktur pelatihan yang tidak dikenal.

Yang menarik, generasi muda yang membantu orang tua atau kerabatnya dalam mengelola UMKM menunjukkan tingkat literasi digital yang lebih baik. Mereka dengan cepat mempelajari platform-platform baru dan mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam operasional usaha. Namun, mereka sering kali menghadapi hambatan dari generasi yang lebih tua yang kurang percaya pada sistem digital. Konflik antargenerasi ini menjadi

tantangan tersendiri dalam proses digitalisasi UMKM. Priambodo dan Santosa pada tahun 2021 menegaskan bahwa tanpa peningkatan literasi digital yang merata di semua lapisan, UMKM akan kesulitan bersaing di pasar berbasis teknologi.

Keterbatasan Modal dan Kepercayaan Terhadap Teknologi

Observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan dana menjadi penghambat besar dalam digitalisasi UMKM. Pengeluaran untuk membeli perangkat baru, berlangganan paket data, dan mengikuti pelatihan dianggap mahal oleh sebagian besar pelaku UMKM. Bagi mereka yang pendapatannya pas-pasan, investasi di bidang teknologi dianggap sebagai pengeluaran yang tidak mendesak, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan pokok sehari-hari atau modal untuk membeli stok barang. Seorang penjual nasi goreng di kawasan Cot Girek mengatakan bahwa ia lebih memprioritaskan uangnya untuk membeli bahan baku berkualitas daripada membeli ponsel baru atau paket internet.

Sementara itu, sebagian pelaku usaha masih meragukan manfaat digitalisasi. Mereka mempertanyakan apakah peningkatan penjualan yang diperoleh dari penjualan online sebanding dengan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Ketidakpercayaan ini sering kali didasari oleh pengalaman pribadi atau informasi yang kurang lengkap tentang potensi ekonomi digital. Beberapa pelaku UMKM menceritakan pengalaman teman atau tetangga yang gagal dalam penjualan online karena tertipu pembeli atau salah mengelola keuangan. Pengalaman negatif ini kemudian digeneralisasi menjadi anggapan bahwa digitalisasi itu berisiko dan tidak menguntungkan.

Temuan ini didukung oleh Tambunan pada tahun 2019, yang menyebutkan bahwa persepsi risiko menjadi salah satu hambatan utama bagi digitalisasi UMKM di Indonesia. Persepsi risiko ini tidak hanya mencakup risiko finansial tetapi juga risiko psikologis seperti rasa malu jika gagal atau takut terlihat bodoh di depan orang lain. Membangun kepercayaan terhadap teknologi membutuhkan pendekatan yang bertahap dan dukungan dari lingkungan sosial, bukan sekadar penyuluhan atau seminar.

Pentingnya Modal Sosial dan Jaringan Komunitas

Walaupun belum banyak memanfaatkan teknologi, banyak pelaku UMKM di Lhokseumawe masih bertumpu pada dukungan dari komunitas lokal, pelanggan tetap, serta hubungan kekeluargaan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dan dapat diandalkan dalam menjalankan usaha. Seorang pengusaha kue khas Aceh di kawasan Pusong menjelaskan bahwa sembilan puluh persen pelanggannya adalah orang-orang yang sudah dikenal dan percaya pada kualitas produknya. Ia tidak perlu beriklan di media sosial karena pelanggan lama akan merekomendasikan produknya kepada kerabat dan tetangga.

Komunitas pengajian, arisan, dan perkumpulan sosial lainnya menjadi saluran pemasaran yang efektif bagi UMKM lokal. Di pertemuan-pertemuan informal ini, informasi tentang produk, harga, dan kualitas menyebar dengan cepat melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Kepercayaan yang sudah terbangun dalam jaringan sosial ini menjadi modal berharga yang tidak dapat digantikan oleh iklan digital. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan peran modal sosial dalam strategi digitalisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Putnam dalam teorinya.

Namun demikian, ketergantungan pada modal sosial juga memiliki keterbatasan. Jangkauan pasar yang hanya mengandalkan jaringan lokal tidak akan pernah melampaui batas-batas geografis dan demografis komunitas tersebut. UMKM yang hanya mengandalkan modal sosial akan sulit berkembang dan menjangkau pasar yang lebih

luas. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan kekuatan modal sosial dengan kapabilitas digital, sehingga UMKM dapat mempertahankan basis pelanggan setianya sambil menjangkau pelanggan baru di luar jaringan tradisional.

Digitalisasi sebagai Strategi Selektif, Bukan Solusi Umum

Hasil studi menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM melihat digitalisasi sebagai keharusan. Banyak yang hanya memanfaatkan sebagian kecil teknologi, seperti WhatsApp atau Instagram, tanpa menerapkan sistem digital secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi dilakukan secara selektif, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing usaha. Seorang pengrajin sulaman di Kecamatan Muara Satu mengaku hanya menggunakan WhatsApp untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan, sementara untuk proses produksi dan pembukuan ia masih menggunakan cara manual.

Strategi selektif ini mencerminkan kearifan lokal dalam menghadapi perubahan. Pelaku UMKM tidak serta-merta mengadopsi semua teknologi yang tersedia, tetapi memilih yang paling sesuai dengan konteks bisnis mereka. Mereka juga cenderung mengadopsi teknologi secara bertahap, dimulai dari yang paling sederhana dan murah, kemudian meningkat seiring dengan bertambahnya kemampuan dan kepercayaan diri. Pendekatan inkremental ini lebih realistis dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan revolusioner yang memaksakan perubahan drastis.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi bukanlah proses yang homogen dan linear. Setiap UMKM memiliki jalur digitalisasinya sendiri, tergantung pada jenis usaha, karakteristik pelanggan, sumber daya yang dimiliki, dan preferensi pribadi pemilik. Kebijakan digitalisasi yang seragam dan terpusat cenderung tidak efektif karena mengabaikan keragaman ini. Pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik UMKM diperlukan untuk mendorong digitalisasi yang inklusif.

Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi di Lapangan

Wawancara dengan aparat pemerintah daerah mengungkapkan bahwa meskipun ada kebijakan untuk mendorong digitalisasi UMKM, dampaknya belum dirasakan secara luas. Program-program seperti pelatihan digital, bantuan perangkat, dan pendampingan usaha telah dijalankan, namun cakupannya masih terbatas dan tidak menjangkau UMKM di lapisan paling bawah. Banyak program pelatihan bersifat umum, tidak tepat sasaran, dan kurang berkelanjutan. Seorang pejabat di Dinas Koperasi dan UKM Lhokseumawe mengakui bahwa evaluasi program masih lemah, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah peserta pelatihan benar-benar mengimplementasikan ilmunya.

Ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara arah kebijakan yang dirancang di tingkat atas dengan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan. Kebijakan sering kali dirancang berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak selalu sesuai dengan realitas lokal. Misalnya, program pelatihan e-commerce yang menggunakan platform nasional atau internasional tanpa mempertimbangkan preferensi lokal pelaku UMKM dan pelanggannya. Atau bantuan perangkat yang diberikan tanpa disertai pendampingan teknis yang memadai, sehingga perangkat tersebut tidak termanfaatkan secara optimal.

Ketidaksesuaian ini juga diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga. Program dari kementerian pusat, dinas provinsi, dan dinas kota/kabupaten sering kali tumpang tindih atau bahkan kontradiktif. UMKM dihadapkan pada berbagai program dengan pendekatan berbeda yang membingungkan. Dibutuhkan sinergi dan harmonisasi kebijakan di semua tingkatan agar intervensi digitalisasi lebih efektif dan efisien.

Strategi Adaptasi Mandiri oleh Pelaku UMKM

Meskipun menghadapi banyak tantangan, sebagian pelaku UMKM mulai berinisiatif untuk belajar secara mandiri. Mereka menonton video tutorial di YouTube untuk mempelajari cara berjualan di marketplace, mengikuti pelatihan daring gratis yang diselenggarakan oleh platform digital atau lembaga swasta, atau meminta bantuan generasi muda yang lebih paham teknologi. Seorang ibu rumah tangga yang memproduksi keripik pisang menceritakan bagaimana ia belajar membuat konten menarik untuk Instagram dari anaknya yang masih duduk di bangku SMA. Ia juga bergabung dalam grup WhatsApp yang berisi sesama pelaku UMKM untuk saling berbagi tips dan pengalaman.

Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya aktif dari pelaku usaha untuk beradaptasi, meskipun dengan sumber daya terbatas. Kemauan belajar dan fleksibilitas menjadi aset penting dalam menghadapi ketimpangan digital. Mereka yang proaktif dan terbuka terhadap perubahan memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran ketimpangan, meskipun tanpa dukungan formal dari pemerintah atau lembaga lain. Inisiatif-inisiatif mandiri ini perlu diapresiasi dan difasilitasi, bukan diabaikan atau dianggap sepele.

Yang menarik, strategi adaptasi mandiri ini sering kali bersifat kolaboratif. Pelaku UMKM saling membantu dalam mempelajari teknologi baru, berbagi akses internet, atau bahkan bersama-sama membeli perangkat yang mahal. Solidaritas komunal yang menjadi ciri khas masyarakat Lhokseumawe ternyata dapat menjadi fondasi bagi pengembangan kapabilitas digital kolektif. Hal ini membuka peluang bagi pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Urgensi Pendekatan Inklusif dan Partisipatif

Penelitian ini menegaskan perlunya melibatkan pelaku UMKM dalam proses perumusan kebijakan dan pelatihan. Pendekatan dari atas (top-down) saja tidak memadai tanpa memahami secara langsung kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Kebijakan yang dirancang tanpa konsultasi dengan kelompok sasaran cenderung tidak relevan dan kurang mendapat dukungan. Pelaku UMKM perlu diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima program.

Pendekatan yang partisipatif dan berbasis pengalaman lokal menjadi lebih relevan dan efektif. Pelatihan yang dirancang bersama komunitas, menggunakan metode dan bahasa yang akrab, serta diselenggarakan di lingkungan yang nyaman akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Pendampingan berkelanjutan juga lebih penting daripada pelatihan satu kali yang padat materi tetapi sulit dicerna. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka lebih suka belajar dalam kelompok kecil di mana mereka dapat bertanya secara leluasa dan berdiskusi dengan sesama peserta.

Pendekatan partisipatif juga berarti mengakui dan menghargai pengetahuan lokal yang sudah dimiliki pelaku UMKM. Mereka bukanlah kertas kosong yang perlu diisi dengan pengetahuan dari luar, tetapi memiliki pengalaman berharga yang dapat menjadi modal dalam proses digitalisasi. Pengetahuan tentang pasar lokal, preferensi konsumen, dan dinamika sosial-budaya yang mereka miliki justru dapat memperkaya strategi digitalisasi yang lebih kontekstual.

Spesifikasi Konteks Lhokseumawe dalam Proses Digitalisasi

Sebagai kota yang tengah beralih dari sektor industri ke ekonomi kerakyatan, Lhokseumawe menghadapi tantangan unik dalam menerapkan digitalisasi UMKM. Sejarah kota ini sebagai pusat industri LNG telah membentuk struktur sosial dan ekonomi yang khas, dengan munculnya kelas pekerja industri dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Ketika industri LNG mulai meredup, banyak tenaga kerja yang beralih ke sektor informal dan UMKM, namun dengan keterampilan dan mentalitas yang mungkin berbeda dengan pelaku usaha tradisional.

Tidak cukup hanya mengadopsi teknologi, namun perlu adanya strategi digital yang berakar pada budaya lokal dan struktur sosial yang khas di daerah tersebut. Nilai-nilai keislaman yang kuat, adat istiadat Aceh yang masih dijunjung tinggi, dan pola hubungan sosial yang komunal harus menjadi pertimbangan dalam merancang intervensi digitalisasi. Misalnya, platform digital yang dikembangkan perlu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, atau program pelatihan perlu disesuaikan dengan jadwal kegiatan keagamaan dan adat.

Di sisi lain, posisi geografis Lhokseumawe sebagai kota transit di jalur timur-sumatera juga membuka peluang tersendiri. Arus barang dan orang yang melewati kota ini dapat menjadi pasar potensial yang belum tergarap optimal melalui platform digital. Pengembangan UMKM berbasis digital yang terintegrasi dengan sektor logistik dan pariwisata dapat menjadi strategi yang tepat untuk memanfaatkan posisi strategis ini.

Kontribusi Teoretis dan Praktis

Secara teoritis, studi ini memperluas wawasan tentang ketimpangan ekonomi di era digital, terutama dalam konteks geografis tertentu. Dengan mengintegrasikan tiga perspektif teoritis yaitu ketimpangan struktural, transformasi digital, dan modal sosial, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami kompleksitas digitalisasi UMKM di daerah. Temuan tentang strategi adaptif selektif dan pentingnya konteks lokal memperkaya diskursus tentang digitalisasi yang selama ini cenderung didominasi oleh perspektif teknokratis dan universal.

Dari sisi praktis, temuan ini dapat digunakan untuk merancang program digitalisasi yang lebih relevan dan adaptif. Pelatihan berbasis komunitas yang memanfaatkan modal sosial lokal, subsidi perangkat teknologi yang tepat sasaran, dan peningkatan literasi digital yang sesuai dengan kondisi lokal menjadi rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan. Lebih dari itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif yang melibatkan UMKM sebagai mitra aktif, bukan sekadar penerima bantuan.

Penelitian ini juga memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih inklusif. Data dan analisis yang disajikan dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas intervensi, mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, dan memonitor dampak kebijakan. Bagi akademisi, studi ini membuka agenda penelitian lebih lanjut, misalnya tentang perbandingan antar wilayah, analisis kuantitatif faktor-faktor penentu keberhasilan digitalisasi, atau studi longitudinal tentang perubahan ketimpangan dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dalam era digital yang terjadi pada UMKM di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, sosial, dan budaya yang saling terkait. Hambatan utama yang dihadapi UMKM adalah

keterbatasan dalam mengakses infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang tidak merata dan perangkat teknologi yang mahal. Selain itu, tingkat literasi digital yang rendah semakin memperburuk kesenjangan, mengingat tidak semua pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi digital dengan maksimal. Kemampuan untuk memahami, mengoperasikan, dan mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik bisnis sehari-hari ternyata tidak merata di kalangan UMKM, menciptakan stratifikasi baru dalam ekosistem usaha lokal.

Modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal berperan penting sebagai penopang kelangsungan UMKM di tengah perubahan digital. Jaringan kekeluargaan, kepercayaan komunal, dan solidaritas sosial menjadi penyangga yang memungkinkan UMKM tetap bertahan meskipun tertinggal dalam adopsi teknologi. Namun demikian, kekuatan ini belum cukup efektif untuk mempercepat adopsi teknologi secara menyeluruh karena sifatnya yang lokal dan terbatas. Tanpa disertai peningkatan kapasitas digital, ketergantungan pada modal sosial justru berisiko memperkuat keterpinggiran dalam jangka panjang.

Di samping itu, terdapat ketidaksesuaian antara program digitalisasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan kebutuhan aktual UMKM. Program-program yang dirancang secara top-down cenderung mengabaikan keragaman kondisi dan preferensi pelaku UMKM, sehingga kebijakan tersebut sering kali tidak kontekstual dan kurang inklusif. Pelaku UMKM membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal.

Secara umum, proses digitalisasi sektor UMKM di Kota Lhokseumawe berlangsung secara tidak merata dan terbatas, menciptakan dinamika ketimpangan yang kompleks. Digitalisasi, yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan ekonomi, justru berisiko memperluas kesenjangan jika tidak disertai dengan intervensi yang adil dan berbasis pada kebutuhan spesifik lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi bukanlah solusi instan, melainkan alat yang membutuhkan strategi implementasi yang tepat dan kontekstual.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mengatasi ketimpangan digital di kalangan UMKM Kota Lhokseumawe. Pertama, pengembangan infrastruktur digital perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Pemerintah diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di wilayah yang tertinggal seperti kecamatan pinggiran kota, agar seluruh pelaku UMKM dapat menikmati akses internet yang layak dan terjangkau. Ini mencakup tidak hanya penyediaan jaringan tetapi juga memastikan keterjangkauan harga dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Kedua, pelatihan literasi digital yang berkelanjutan harus dirancang sebagai kegiatan berkelanjutan yang menyesuaikan dengan kebutuhan riil UMKM. Pendekatan berbasis komunitas dan pendampingan oleh mentor lokal dapat memperkuat hasil pelatihan. Pelatihan tidak cukup dilakukan sekali, tetapi perlu ada mekanisme pendampingan jangka panjang dan forum diskusi berkelanjutan di mana pelaku UMKM dapat saling berbagi pengalaman dan memecahkan masalah bersama.

Ketiga, pendekatan digitalisasi yang berbasis lokal perlu diadopsi dalam setiap kebijakan. Kebijakan digitalisasi harus mempertimbangkan karakteristik budaya dan ekonomi masyarakat Kota Lhokseumawe. Strategi yang menggabungkan pendekatan dari atas dengan partisipasi aktif dari bawah akan lebih efektif dalam menjawab kebutuhan

pelaku UMKM. Ini berarti melibatkan tokoh masyarakat, pelaku UMKM senior, dan komunitas lokal dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Keempat, optimalisasi modal sosial lokal harus dilakukan secara sistematis. Komunitas bisnis lokal perlu diperkuat dan dimanfaatkan sebagai mitra strategis dalam mempercepat proses transformasi digital UMKM. Dukungan jaringan sosial informal dapat memperluas adopsi teknologi secara lebih cepat jika diarahkan dengan tepat. Pemerintah dapat memfasilitasi pertemuan-pertemuan komunitas, menyediakan ruang diskusi, dan memberikan insentif bagi kelompok-kelompok yang berhasil mengadopsi teknologi secara kolektif.

Kelima, evaluasi dan pemantauan program digitalisasi harus menjadi bagian integral dari setiap intervensi. Setiap program digitalisasi perlu disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, guna memastikan keberhasilan implementasi serta keterlibatan semua pelaku UMKM secara inklusif. Data dan temuan dari evaluasi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki program selanjutnya, menciptakan siklus pembelajaran yang berkelanjutan.

Terakhir, diperlukan sinergi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Digitalisasi UMKM bukan tanggung jawab satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerja sama semua elemen. Dengan sinergi yang baik, komitmen bersama, dan pendekatan yang tepat, digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk menciptakan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kota Lhokseumawe.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, H., & Syafruddin, R. (2021). Potensi dan Tantangan UMKM di Kota Lhokseumawe dalam Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 45–58.
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482.
- Disperindagkop Lhokseumawe. (2023). Laporan Tahunan Data UMKM Kota Lhokseumawe. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Lhokseumawe.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Data Statistik UMKM 2022. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Nugroho, Y., Siregar, R., & Laksani, F. (2020). Mapping Indonesia's Digital Divide. Jakarta: Center for Innovation Policy and Governance.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Priambodo, B., & Santosa, H. (2021). Digital Readiness of MSMEs in the Post-COVID Era. *Journal of Small Business Strategy*, 31(1), 75–89.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Tambunan, T. T. H. (2019). Digitalisasi UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 34(1), 53–68.
- World Bank. (2021). *Digital Economy for Indonesia: Toward Inclusion and Resilience*. Washington, DC: World Bank Group.